

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBAGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA MAKASSAR
PERIODE 2011-2017**

Diajukan Oleh

Margareta Perasa Ritan
4515011001



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar Periode 2011-2017
Nama Mahasiswa : Margareta Prasa Ritan
Stambuk : 4515011001
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Thamrin Abduh., SE., M.Si.

Pembimbing II

Syamsuddin Jafar., SE., M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. A. Arifuddin Mané, SE., M.Si., SH.MH

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**

Rafiuddin, SE., M.Si.

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Margaretha Prasa Ritan
Stambuk : 4515011001
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : *Ekonomi*
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar Tahun
2011-2017

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya dan sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Makassar, Agustus 2019

menyatakan,



Margareta Prasa Ritan
4515011001

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA MAKASSAR
PERIODE 2011-2017**

Oleh :

Margaretha Prasa Ritan

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Margaretha Prasa Ritan Ritan 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar, yang dibimbing oleh Dr.Thamrin Abduh,SE.,M.Si dan Syamsuddin Jafar,SE.,M.Si.

Tujuan peneliiian ini untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Perumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder selama runtun waktu 7 tahun (2011-2017).

Data dianalisis dengan menggunakan menggunakan regresi linear berganda, Variabel Pendapatan Asli Daerah ,memiliki nilai koefisien regresi yang posiif, ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.

Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap nilai PDRB, dengan asumsi bahwa variabel independenyang lain dianggap konstan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi

**THE EFFEC OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND
BALANCE FUNDS ON ECONOMIC GROWTH IN
THE CITY OF MAKASSAR
PERIOD 2011-2017**

By:

Margaretha Prasa Ritan

**Economic Development Program Of the Faculty of economics
Universitas Bosowa**

ABSTRAC

Margaretha Perasa Ritan 2019.. The Effect of Local Revenue and Balancing Funds on Economic Growth in Makassar City. . Is guided by, Dr.Thamrin Abduh, SE., M.Si and Syamsuddin Jafar, SE.,M.Si.

The Purpose of this Study was to determine the Effect of Regional Revenue and Balancing Funds on Economic Growth in Makassar City. Research Location in Makassar City. The Data used in this Study are Secondary data for a Period of 7 years (2011-2017).

Data were analyzed using multiple linear regression, Regional Original Revenue Variables have a positive regression coefficient, this shows that regional revenue has a positive effect on the value of Gross Regional Product, assuming that the other independent variables are considered constant.

The balancing fund has a positive regression coefficient value indicating that the balancing fund hs a positive effect Gross Regional Product value, assuming that the other independent variables are considered constant.

Keyword :Locally generated Revenue, Balancing Funds, Economic Growth.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

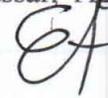
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi adalah mudah namun banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi walaupun demikian penulis berusaha melaluinya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga di manapun berada atas jerih payahnya selama ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada dosen dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan serta bantuan pada penulis selama ini, utamanya terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
3. Bapak Dr, Thamrin Abduh,SE.,M.Si sebagai Konsultan I dan Bapak Syamsuddin Jafar.SE.,M. sebagai Konsultan II yang telah membimbing penulis mulai dari penyusunan sampai pada perampungan akhir skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah mengasuh penulis dalam menempuh perkuliahan.
5. Bapak/ Ibu Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

6. Keluarga besar Fakultas Ekonomi Serta rekan-rekan penulis yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap kritikan dan masukan sangat berarti untuk kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, terkhususnya bagi penulis pribadi.

Makassar, Agustus 2019



Margareta Prasa Ritan

BOSOWA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERISINILAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitaian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.1.3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.5 Pengertian Dana Perimbangan	12
2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Perimbangan.....	18
2.1.7 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.8 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2 Kerangka Pikir.....	30
2.3 Hipotesis.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	32
3.2 Metode Pengumpulan Data	32
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Analisis Data	33
3.5 Definisi Operasional.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.2 Pembahasan.....	41
4.3 Statistik Deskriptif.....	46
4.3.1 Uji Autokorelasi	47
4.3.2 Multikolinearitas	48
4.4 Pengujian Hipotesis	49
4.4.1 Analisis Regresi Berganda	49
4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi.....	51
4.4.3 Uji F.....	52
4.4.4 Uji t.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

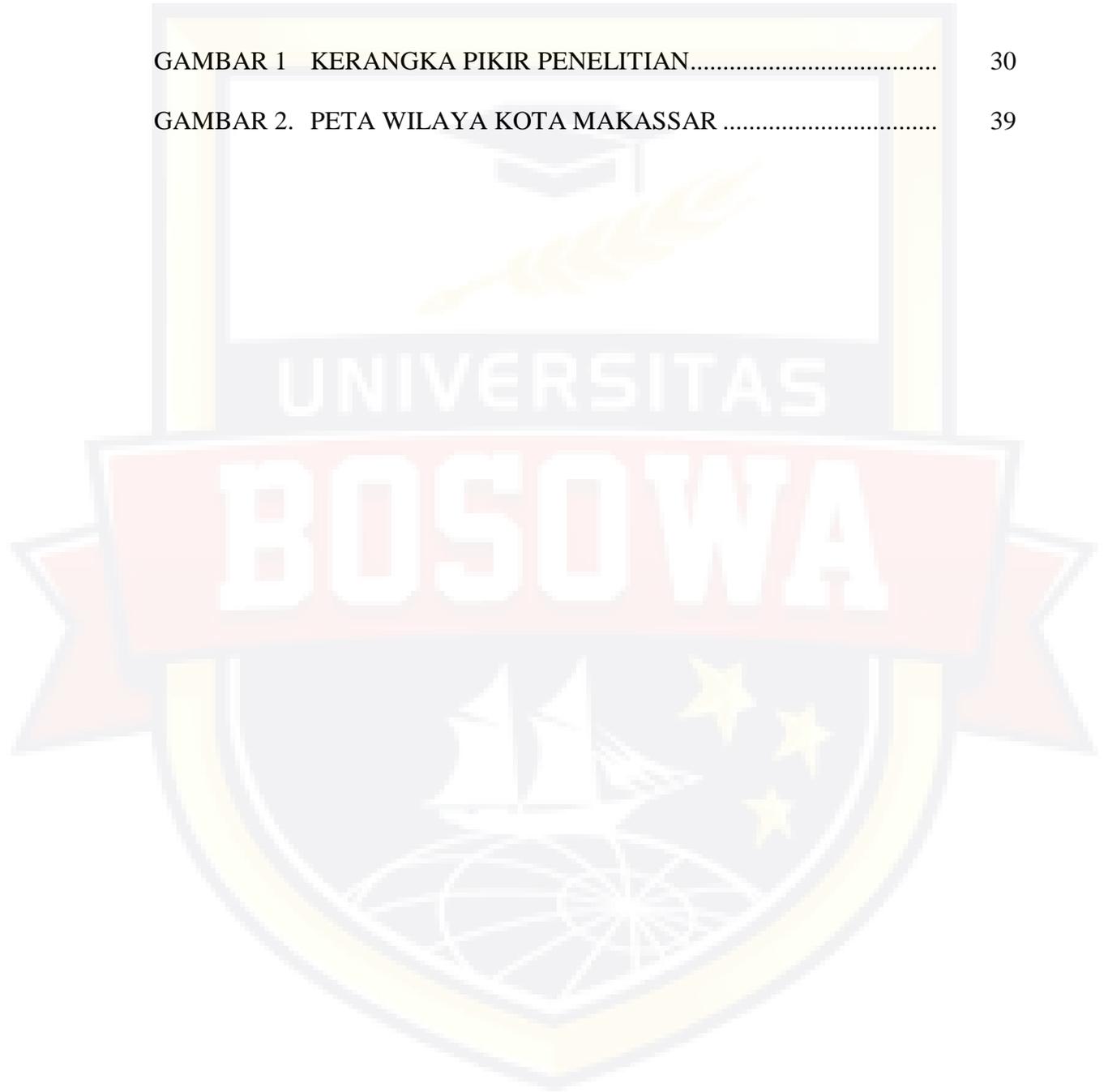
DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1	PRESENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017	4
TABEL 4.1	JUMLAH KELURAHAN MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017	40
TABEL 4.2	LUAS WILAYAH DAN PRESENTASE TERHADAP LUAS WILAYA KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR ..	41
TABEL 4.3	PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR	43
TABEL 4.4	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017	46
TABEL 4.5	REALISASI DANA PERIMBANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017	45
TABEL 4.6	DESCRIPTIVE STATISTIC	46
TABEL 4.7	HASIL UJI AUTOKORELASI.....	48
TABEL 4.8	HASIL UJI MULTIKOLIEARITAS.....	49
TABEL 4.9	HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA	50
TABEL 4.10	KOEFISIEN DATERMINASI.....	51
TABEL 4.11	ANOVA.....	53
TABEL 4.12	HASIL UJI PARSIAL	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 KERANGKA PIKIR PENELITIAN.....	30
GAMBAR 2. PETA WILAYA KOTA MAKASSAR	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dana ini, adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD terdiri atas : (1). Penerimaan pajak daerah; (2). Penerimaan retribusi daerah; (3). Penerimaan dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; (4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Adapun dana penerimaan perimbangan bersumber dari (1). Bagi hasil pajak; (2). Bagi hasil sumber daya alam (SDA); (3). Dana alokasi umum; dan (4). Dana alokasi

khusus. Sedangkan penerimaan lain-lain bersumber dari; (1). Bantuan/hibah; (2). Dana penyesuaian (3). Dana darurat;.

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dalam perimbangan tersebut adalah dana alokasi Umum. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan etonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatam asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah(non PAD) sifatnya lebih terikat.

Sementara dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan khusus agar mendorong percepatan pembangunan daerah. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah pertama, mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Kedua, kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja tinggi. Ketiga, mampu sebagai penggerak swadaya

masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas social yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai Orientasi berfikir People Centered orientation. Keempat, mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berfikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijakan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program utusan yang ditetapkan.

Tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu (Bird dan vvaillanccourt, 2012:15): Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Devulusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Adapun pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis, dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termaksud pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan sumber-sumber penerimaan daerah

yang terdiri dari : pertama, pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil SDA dan non SDA, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Ketiga, pinjaman daerah dan keempat, lain-lain penerimaan yang sah pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*Horisontal imbalance*)

Tabel 1.1
Presentase Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di
Kota Makassar Tahun 2011-2017
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
2011-2017

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	67.281.771,03	114,9	64.622.103,62	10,36
2012	78.013.037,45	133,2	70.851035,02	9,64
2013	88.169.949,57	150,6	76.907.410,80	8,55
2014	100.026.504,93	170,8	82.592.004,59	7,40
2015	114.171.731,0	192,4	88.740.213,2	7,44
2016	127.353.171,7	100,00	95.836.984,8	7,99
2017	143.148.662,0	100,00	103.857.071,9	8,46

Sumber : Bps Kota Makassar

Berdasarkan tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 PDRB yang berlaku (Rp) 67.281.771,03 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 78.013.037,45, dan pada tahun 2013 88.169.949,57., 2014 PDRB berlaku (Rp) Rp. 100.026 .504,93 dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 114.171.731,00 atau mengalami peningkatan sebesar 192,4% dan

selanjutnya pada tahun 2016 jumlah PDRB Rp127.353. 171,7 mengalami perkembangan sebesar 100,00% dan pada tahun 2017 PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp 143.148.662.

Dari tabel di atas memperlihatkan secara rata-rata PAD dan Dana Perimbangan dari tahun 2011 sampai 2017 menunjukkan sangat berpengaruh terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang sangat mempengaruhi karena pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan oleh daerah untuk pembangunannya, sehingga PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Hadi Sasana (2006) PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB juga dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan uraian-uraian telah disebutkan di atas, maka penelitian diatas tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Periode 2011-2017
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Periode 2011-2017

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Periode 2011-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Periode 2011-2017

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Sebagai bahan masukan dan bahan informasi untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendapatan yang mendukung arah kebijakan fiskal yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota Makassar.
2. Serta memberikan bahan referensi bagi setiap peneliti, dalam melakukan penelitian yang sejenis yang ingin mengetahui tentang pengembangan ekonomi publik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sdan dana perimbangan khususnya di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Mengumpulkan dana untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pengertian ini pula masih belum lengkap, karna banyak pakar dibidang ekonomi memberikan pengertian pendapatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian pendapatan, maka menurut; yang dikemukakan oleh Paul A. Samulson (Sudarman Ari 2012;214) mengatakan:

Pendapatan merupakan total uang yang diperoleh atau yang dikumpul dalam satu periode tertentu dan perlu dibedakan dalam kekayaan. Dimana kekayaan diartikan sebagai persediaan netto aktiva harta nyata dan harta keuangan milik seseorang pada suatu saat tertentu

Pengertian pendapatan yang di kemukan oleh pakar ekonomi modern ini, sebenarnya terdiri dari dua aspek pengertian pendapatan. Aspek pertama pendapatan dilihat dari aspek rumah tangga konsumen dan pendapatan dilihat

dari rumah tangga produsen. Akan tetapi mempunyai arah yang sama. pendapatan tersebut dapat pula dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu pendapatan nasional menurut Lincolin Arsyad (2011;27), menyatakan : pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian Negara dalam suatu periode tertentu.

Dalam pengertian ini analisa pendapatan nasional dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi yang dilakukan dengan jalan penjumlahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan setiap sector produktif dalam suatu Negara dalam suatu periode tertentu. Jumlah nilai produksi ini disebut gross domestic product. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan pendekatan itu sendiri dan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran dimana pendekatan di lakukan dengan jalan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang di terima oleh seluruh lapisan masyarakat akan dibelanjakan atau dikomsumsikan pada berbagai barang dan jasa.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah suatu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan tonomi daerah .(Herlina Rahman 2005:38)

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat juga, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya. Berikut ini merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. (tambunan, 2006 jolianis, 2012).

2.1.3 Jenis-Jenis Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo 2006:12)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo 2011:15)

Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum,
 - b. Retribusi Jasa Usaha,
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba usaha milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Ema,2013).

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah menurut Ali chakim (2011) adalah hasil daerah yang di peroleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah.

2.1.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1),Pertama, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah. (2),Kedua, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. (3),Ketiga, pendapatan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari prngelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : bagian laba atas penyetaan modal pada perusahaan milik Negara BUMD.

2.1.5 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (2002) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana Bagi Hasil(DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase unyuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,2005:108).

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasilan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di mana 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

d. Kehutanan

Penerimaan sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

e. Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dan penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

f. Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan dan diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten dan kota.

g. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak

bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbalan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, di mana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

h. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumberPenerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbalan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten dan kota penghasil 0,2% dibagikan untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

i. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten dan kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah 2005:108).

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia No.6

Tahun 2011 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten /kota Tahun Anggaran 2011, Presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi: Pasal 1

- 1) Dana Alokasi Umum dalam peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Negara Tahun Anggaran 2011.
- 2) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/kota.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

Menurut HadiSasana (2011) Dana Perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimasukkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan meratakan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.1.6 Faktor yang mempengaruhi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat Daerah, mengatasi persoalan efekpelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim2013). Dana Perimbangan dipisahkan menjadi empat jrnis yaitu:

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal 11 UU No. 33/2004
2. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud terdiri dari:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

- a) Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan,
- b) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

4. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer atau block grant dari pempus penting untuk pemma dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh negri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2012). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan public antar-daerah, dan untuk

menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2011).

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

3) Dana Perimbangan dari Provinsi

Dalam UU no 33/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam ke Undang-Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan. Hibah , Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Abdullah dan Halim;2011). Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan

pemerintah daerah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Abdullah dan Halim 2011).

2.1.7 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah Proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi teraebut merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi suatu pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya perumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. (Sukirno 2010).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana, antara lainnya sumbera daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2014). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan insfrastuktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan daerah.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin dan Liu (2012) bahwa upaya

desentralisasi memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Staurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno,2010). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Arti perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod-Domar yang dikembangkan secara terpisah dalam periode yang bersamaan oleh E.S Domar dan R,F Harrod. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestic untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.

Menurut Simon Kuznets, Pertumbuhan ekonomi adalah Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya.

Kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Dari definisi tersebut terdapat berbagai tiga komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

- a. Kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu Negara.
- b. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
- c. Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam kemajuan teknologi baru, perlu dilakuka penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideology. Inovasi dalam bidang teknologi harus barengi dengan inovasi dalam bidang social.

2.1.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi :

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan factor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompeensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan

proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, yambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas yang telah terjadi pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepaan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan srbagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan sebaihya.
5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

a) Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya atau tanah. “Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan sumber daya tidak akan membangun dengan cepat.

b) Akumulasi Modal

Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasi kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik suatu negara dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi “infrastruktur” ekonomi dan social.

Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada. Satu hal yang penting harus dipahami di sini adalah bahasannya untuk mencapai maksud investasi tersebut selalu dituntut adanya pertukaran antara konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Artinya, pihak-pihak pelaku investasi

harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi yang lebih baik di kemudian hari.

Menurut Rostow (2010) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut infrastruktur ekonomi dan social. Contohnya adalah pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga. Tenaga terdidik dalam sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital).

c) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Menurut Rostow dan Desi (2010) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

d) Kemajuan Teknologi

Dalam pengertian yang sederhana, kemajuan teknologi digambarkan dengan ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan (misalnya dalam proses produksi) yang lebih efisien dan efektif. Klarifikasi kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral (netral technological progress), kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor technological progress), dan kemajuan teknologi yang hemat modal (capital saving technological progress).

2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Setiap Negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang

lebih baik. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau indicator untuk menilai pertumbuhan ekonomi :

- a. Pendapatan Nasional Riil. Indikator pertama yang umum digunakan di berbagai negara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional riil menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Suatu negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatannya nasional riilnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu produk nasional bruto riil yang berlaku dari tahun ke tahun.
- b. Pendapatan Riil Perkapita. Indikator kedua yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu.
- c. Kesejahteraan Masyarakat. Indikator ketiga digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah nilai kesejahteraan penduduknya. Terjadi peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang. Hal ini dapat ditinjau dari kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi yang lancar menunjukkan distribusi pendapatan per kapita pada seluruh negara/wilayah. Peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata pada seluruh kawasan.

d. Tenaga Kerja dan Pengangguran. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya.

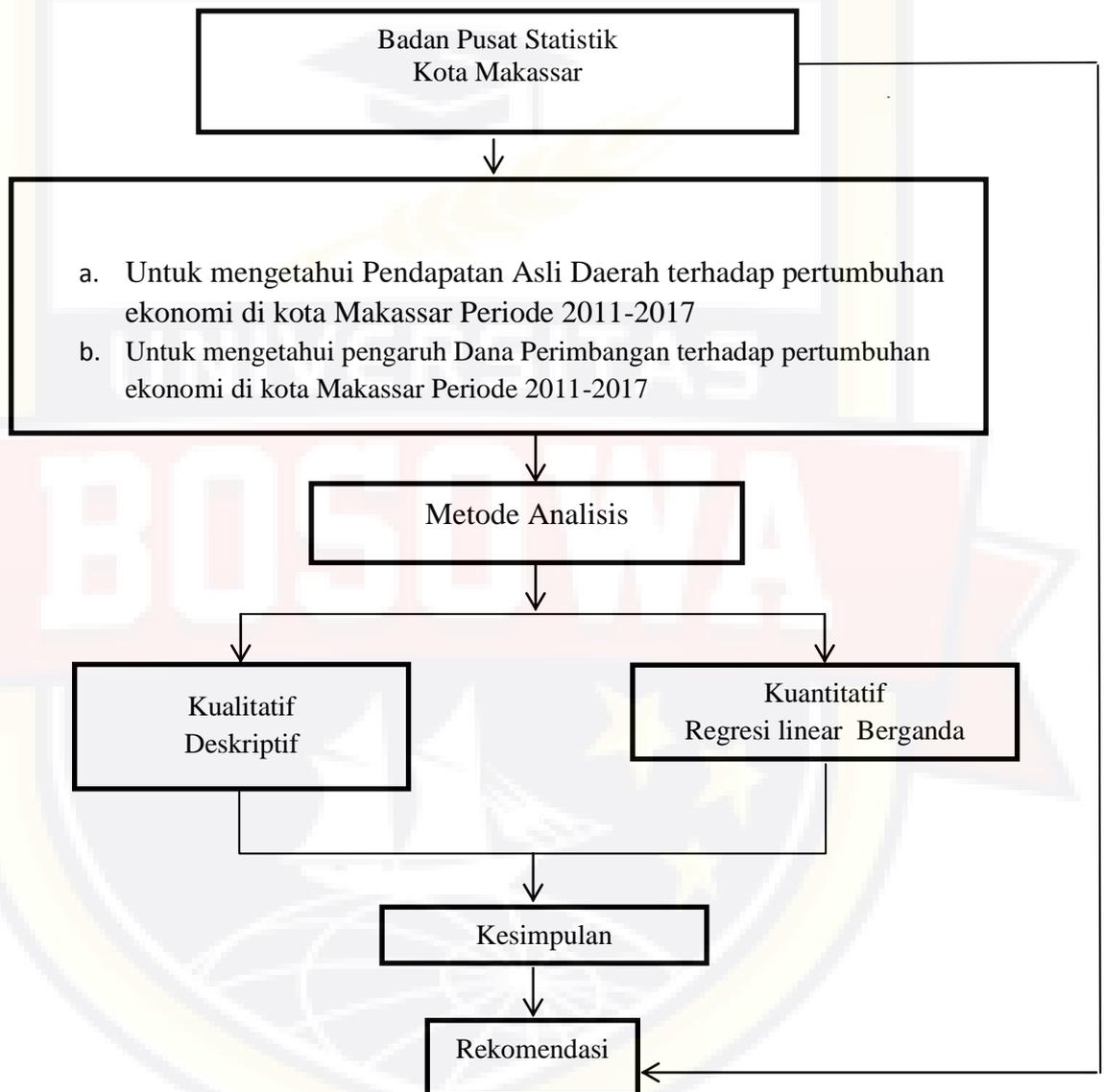
Angkatan kerja yaitu jumlah tenaga kerja terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Suatu negara dipandang sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh apabila tingkat pengangguran kurang dari empat persen (4%).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. berdasarkan kerangka pikir di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Berapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
2. Berapa besar pengaruh Dana Perimbangan yang terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan waktu Penelitian

Daerah penelitian yang ditentukan oleh penulis sehubungan dengan hal ini adalah Di Kota Makassar, tepatnya BPS Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Waktu penelitian selama Mei-Juni 2019

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari kantor, buku (perpustakaan) atau pihak-pihak lain yang diberikan data yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, dan penerbitan lainnya relevan dengan penelitian ini serta wawancara langsung ke pihak yang terkait.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series untuk data nilai potensi pajak daerah yang terdapat Di Kota Makassar dan periode 2011 hingga 2017 untuk data nilai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, sebagian laba daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang terdapat di Kota Makassar, jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah di Kota Makassar. Data-data

tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Makassar serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar dan mengidentifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar, maka digunakan metode analisis komparatif deskriptif yaitu suatu metode yang membandingkan data dari tahun ketahun dan menjelaskannya.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa regresi linear berganda yang merupakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisa data lebih dari satu variabel penelitian.

a. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (Durbin-Watson Test). Yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistic Durbin Watson

(DW test). Jika nilai Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005:68)

b. Model Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi R^2

Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati dalam Mukhtar, 2014:61)

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara statistik bahwa koefisien regresi dari variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna dengan membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan F tabel, dengan ketentuan jika F-statistik > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

3. Uji t (Individu)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dengan t tabel. Dalam

pengujian ini dilakukan dengan uji 2 sisi dengan tingkat kepercayaan 95% atau 5% dengan hipotesis $H_0: \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ dan $\beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

b0 = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

b2 = Koefisien Regresi Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

e = error term

3.5 Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda di variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Tahun 2011 -2017.
2. Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari sumber penerimaan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah, kemampuan daerah melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap APBD maka semakin memperkecil ketergantungan dari pemerintah daerah Kota Makassar 2011-2017.

- a) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan bangunan daerah yang tercatat tahun 2011-2017
 - b) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang dikhususkan disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang dicatat tahun 2011-2017 diukur dengan satuan angka.
 - c) Hasil kekayaan yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatannya sebagai berikut : bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, dan lain-lain yang tercatat tahun 2011-2017 diukur dengan satuan angka.
3. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka presentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan program yang menjadi prioritas nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1822 selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undanh-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kota Praja Makassar diubah menjadi Daerah Tinkat II Koa madya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang. Wilayanya dimekarkan dari 21 Km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilaya Kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubabahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang perubahan Nama Kota madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tinkat II

Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Sebagaimana Peraturan Daerah No,mor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1597.

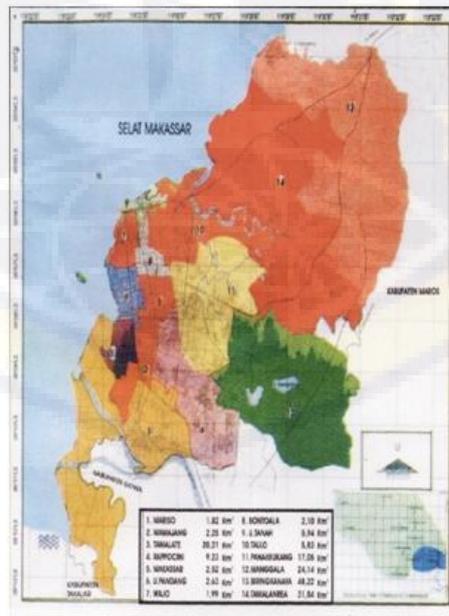
Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian barta pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak :

5°08,6,19 "Lintang Selatan (LS)

119°024'17' 38" Bujur Timur (BT)

Batas administrasi wilaya Kota Makassar berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berdasarkan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b. Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupate Maros
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar



Gambar 2 : Peta Wilayah Kota Makassar

Secara administrasi luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km² yang meliputi 15 Kecamatan dan terbagi dalam 146 kelurahan, 996 RW dan 4.917 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar.

Berikut dapat kita lihat pada tabel.1 dan tabel.2 tentang jumlah kelurahan menurut kecamatan dan luas wilayah serta presentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar :

TABEL 4.1
JUMLAH KELURAHAN MENURUT KECAMATAN
DI KOTA MAKASSAR

No	Kode Wil	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	010	Mariso	9	47	246
2	020	Mamajang	13	56	283
3	030	Tamalate	10	69	369
4	031	Rappocini	10	37	139
5	040	Makassar	14	45	169
6	050	Ujung pandang	10	57	257
7	060	Wajo	8	77	464
8	070	Bontoala	12	50	199
9	080	Ujung Tanah	12	90	473
10	081	Kep. Sangkarrang	3	15	57
11	090	Tallo	15	108	532
12	100	Panakukkang	11	105	505
13	101	Manggala	6	66	366
14	110	Biringkanaya	7	106	566
15	111	Tamalanrea	6	67	330
			146	996	4.971

Sumber : BPS , Makassar dalam Angka 2017

TABEL 4.2
LUAS WILAYA DAN PRESENTASE TERHADAP LUAS WILAYA
MENURUT KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR

No	Kode Wil	Kecamatan	Luas (km) ²	Presentas luas (%)
1	010	Mariso	1.82	1.04
2	020	Mamajang	2.25	1.28
3	030	Tamalate	20.21	11.50
4	031	Rapposini	9.23	5.25
5	040	Makassar	2.52	1.43
6	050	Ujung Pandang	2.63	1.50
7	060	Wajo	1.99	1.13
8	070	Bonoala	2.10	1.19
9	080	Ujung Tanah	5.94	3.38
10	081	Kep. Sangkarrang	1.54	0.88
11	090	Tallo	5.83	3.32
12	100	Panakuk kang	17.05	9.70
13	101	Manggala	24.14	13.73
14	110	Biringkanaya	48.22	27.43
15	111	Tamalanrea	31.84	18.11
Jumlah			175.31	100.88

Sumber : Badan Pusat Statistik, Makassar dalam Angka 2017

4.1.2 Keadaan Penduduk

Penduduk Kota Makassar tahun 2017 tercatat sebanyak 1.489.011 jiwa yang terdiri dari 737.146 laki-laki dan 751.865 perempuan.

4.2 Pembahasan

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan perkembangannya di dalam menunjang dalam pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pembangunan di Kota Makassar berikut ini peneliti menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2011-2017.

4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah mencermati nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan factor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

Dalam menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep domestic. Berarti seluruh nilai tambah ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah atau regional (Provinsi atau Kabupaten) dimasukkan tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan balas jasa atau pendapatan faktor-faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi tersebut.

Dalam pengajian PDRB selalu dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga yang berlaku. Selain itu definisi PDRB berdasarkan harga konstan adalah nilai barang dan jasa atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap. PDRB atas dasar harga konstan ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilainya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu atau tahun sekarang, ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB diperoleh dari produksi seluruh sektor

perekonomian regional yang dijabarkan, terakumulasi dalam tiga kelompok menurut jenisnya yaitu :

- a. Kelompok Primer adalah Sektor yang berlangsung menghasilkan barang jadi (final product). Terdiri dari sektor pertanian , sektor pertambangan dan penggalian.
- b. Kelompok sekunder adalah sector yang dalam menghasilkan barang harus melalui prosos pengolahan terlebih dahulu. Terdiri dari sector industry pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih dan sektor bangunan,
- c. Sector tersier adalah sector yang bergerak dibidang pelayanan (jasa) yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berikut ini peneliti menyajikan data PDRB atas dasar harga konstan.

TABEL. 4.3
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR
Economic Growth Makassar

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Kostan (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	67.281.771,03	114,9	64.622.103,62	10,36
2012	78.013.037,45	133,2	70.851035,02	9,64
2013	88.169.949,57	150,6	76.907.410,80	8,55
2014	100.026.504,93	170,8	82.592.004,59	7,40
2015	114.171.731,00	192,4	88.740.213,2	7,44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	127.353.171,7	100,00	95.836.984,8	7,99
2017	143.148.662,0	100,00	103.857.071,9	8,46

Sumber : BPS Kota Makassar

Dapat dilihat dari tabel 4.3 diatas pada tahun 2011 menunjukkan bahwa PDRB Brllaku (Juta) Makassar Rp 67.281.771,03 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 78.013,037,45 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 88.169.949,57 dan 2014 meningkat menjadi Rp 100.026.504,93 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 114.171.731,00 atau mengalami peningkatan sebesar 192,% selanjutnya pada tahun 2016 jumlah PDRB Berlaku (Juta) Makassar Rp 127.353. 171,7 atau perkenbangan sebesar 100,00% dan pada tahun 2017 Jumlah PDRB Rp 143.148.662,0 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00 %. Realisasi pendapatan daerah Kota Makassar pada periode 2014-2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017

No	Tahun	Pendapat Asli Daerah
1	2011	345.350.562.825,00
2	2012	484.972.799.508,00
3	2013	621.247.679.844,00
4	2014	742.448.756.714
5	2015	828.871.892.852,78
6	2016	971.859.753.606
7	2017	1.337.231.047.257

Sumber : BPS Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat dari hasil regresi diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara benar oleh daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

TABEL 4.5
REALISASI DANA PERIMBANGAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2017

NO	TAHUN	PDRB Harga Koston (Miliar Rupiah)
1	2011	905.361.278.541,00
2	2012	1.105.463.603.654,00
3	2013	161.279.547.759,00
4	2014	1.836.090.960.671
5	2015	1.402.787.592.484
6	2016	1.992.747.630.282
7	2017	1.672.967.166.403,00

Sumber: BPS Kota Makassar

Variabel Dana Perimbangan dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Dari hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Makassar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang terlihat dari lebih

besarnya jumlah Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Ketidak seimbangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, bantuan dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.\

4.3 Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif dilakukan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini serta menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasidari masing-masing variabel yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini hendak menguji pengaruh variabel independen yaitu PDRB atas dasar Harga konstan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel dependen. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Devation	N
Pertumbuhan ekonomi	8.4829	1.12571	7
PAD	7.6171E	32.91244	7
Dana Perimbangan	1.4395E	406.93185	7

Sumber : Output SPSS (16 data diolah)

Variabel Pendapatan Asli Daerah selama periode pengamatan 2011-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 7.6171 dengan nilai standar deviasi sebagai 32.91244 yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean). Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel PAD selama periode 2011-2017.

Variabel Dana Perimbangan selama periode pengamatan 2011-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.4395 dengan standar deviasi sebagai 406.93185 yang menunjukkan nilai deviasi lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean). Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel Dana Perimbangan 2011-2017.

Variabel PDRB selama periode pengamatan 2011-2017 memiliki nilai rata (mean) sebesar 8.4829 dengan nilai standar deviasi sebagai 1.12571 yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean).

4.3.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. $1,65 < DW < 2,35$ berarti tidak ada autokorelasi

- b. $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,90$ berarti dapat disimpulkan
- c. $DW < 1,21$ atau $DW > 2,26$ berarti ada autokorelasi.

Dengan menggunakan program SPSS 16, diperoleh hasil untuk uji autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig F Change	
1	.864 ^a	.746	.619	.69466	.746	5.878	2	4	.064	.1459

- a. Predictoers : (Contant0, Dana Perimbangan, PAD)
- b. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : SPSS 16 (Data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat Durbin-Watson sebesar 1.459 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.2 Multikolinearitas

Multikolinearita berarti ada hubungan linier yang sempurna (pasti) di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Adapun cara pendeteksiannya adalah jika multikolinearitas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R^2 yang tinggi tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir , signifikan secara statistik. Untuk memperdiksi ada atau tidaknya multikolinearitas tang tinggi antara variabel independen dapat didektesi dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umum dipaki untuk menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai tolerance di

atas 0,01 atau sama dengan nilai VIF di bawa 10. Hasil uji multikolieritas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant		
PAD	280	3.576
Dana Perimbangan	280	3.576

Hasil uji multikolieritas tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kedua variabel independen berada di atas 0,01 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terjadi masalah, maka model regresi yang ada tidak untuk dipakai.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (Variabel X) terhadap kejadian lainnya (Variabel Y). analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengaruh regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients*. Untuk mengetahui koefisien variabel PAD dan Dana Perimbangan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91.236	29.129		3.132	.035
PAD	.886	1.200	.352	.738	.501
Dana Perimbangan	2.095	1.831	-.545	-1.144	.316

Dependent Variabel : PDRB

Sumber : Output SPSS 16 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y (\text{PDRB}) = 91.236 + .886X_1 + 2,095X_2$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 91.236. Angka ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 975% .
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0,886. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen maka nilai PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 88,6% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.
3. Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi yaitu 2.095. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan Dana

Peimbangan sebesar 1 persen maka nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 209% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.

4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pada model linear berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel independen (Sulaiman, 2004: 86). Nilai R^2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson	
					F Change	df1	df2		Sig F Change
1	.864 ^a	.746	.619	.69466	5.878	2	4	0.64	1.459

a. Predictors : (Constant), Dana Perimbangan ,PAD

b. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output SPSS 16 (data diloah)

Nilai R menerangkan tingkat hubungan antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,864 atau 864%. Hal ini berarti hubungan antara variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB adalah 864% angka sebesar 864% mengindikasikan bahwa PAD dan Dana Perimbangan hubungan yang kuat dengan PDRB.

Nilai R Square (R^2) pada tabel 10 sebesar 0,746 atau 74,6% artinya variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan dapat menerangkan variabel dependen yaitu PDRB sebesar 74,6 atau R^2 sebesar 0,746 menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebesar 74,6 yang terjadi pada nilai PDRB yang disebabkan oleh PAD dan Dana Perimbangan.

Adjusted R Square (R^2) merupakan nilai R Square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki nilai negatif, dari tabel dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,746 atau 74,6% .

Standard Error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memperdiksi nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 6.9466 % hal ini berarti banyak kesalahan dalam prediksi PDRB. Sebagai pedoman jika standard error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memperdiksi nilai Y.

4.4.3 Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen sebagai daya ramal. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Untuk menguji pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai F hitung dalam tabel ANOVA dengan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel maka hipotesis yang diajukan diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika F hitung $<$ F tabel maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Berdasarkan nilai propabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang di ajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 4 .11

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1.	5.673	2	2.837	5.878	.064 ^a
Regression	1.930	4	483		
Residual	7.603	6			
Total					

a. Predictors : (Constant), Dana Peimbangan, PAD

b. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output SPSS 16 (data diolah)

Berdasarkan tabel ANOVA (*Analysis Of Variance*) tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih besar 5.878 dengan signifikan 0,064 nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan.

4.4.4 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain secara konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t

tabel (Sulaiman, 2004:87). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai t hitung dalam *coefficients* dengan t tabel. Jika t hitung $>$ tabel maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima artinya tidak berpengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

Untuk mengetahui koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Modal	Unstandardized Coefficients		Satandardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	91.236	29.129		3.132	.035
PAD	.886	1.200	.352	.738	.501
Dana Perimbangan	-2.095	1.831	-.545	-1.144	.316

Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan tabel 4.12, maka hasil regresi berganda dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara persial terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel di bawah 5%,

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

1. Menentukan Hipotesis

Ho : secara persial tidak ada pengaruh signifikan antara PAD dengan PDRB

Ha : secara persial ada pengaruh signifikan antara PAD dengan PDRB

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel yang diperoleh t hitung sebesar 738

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dengan derajat kebebasan (dt) $n-k-1$ atau $5-3-1 = 1$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

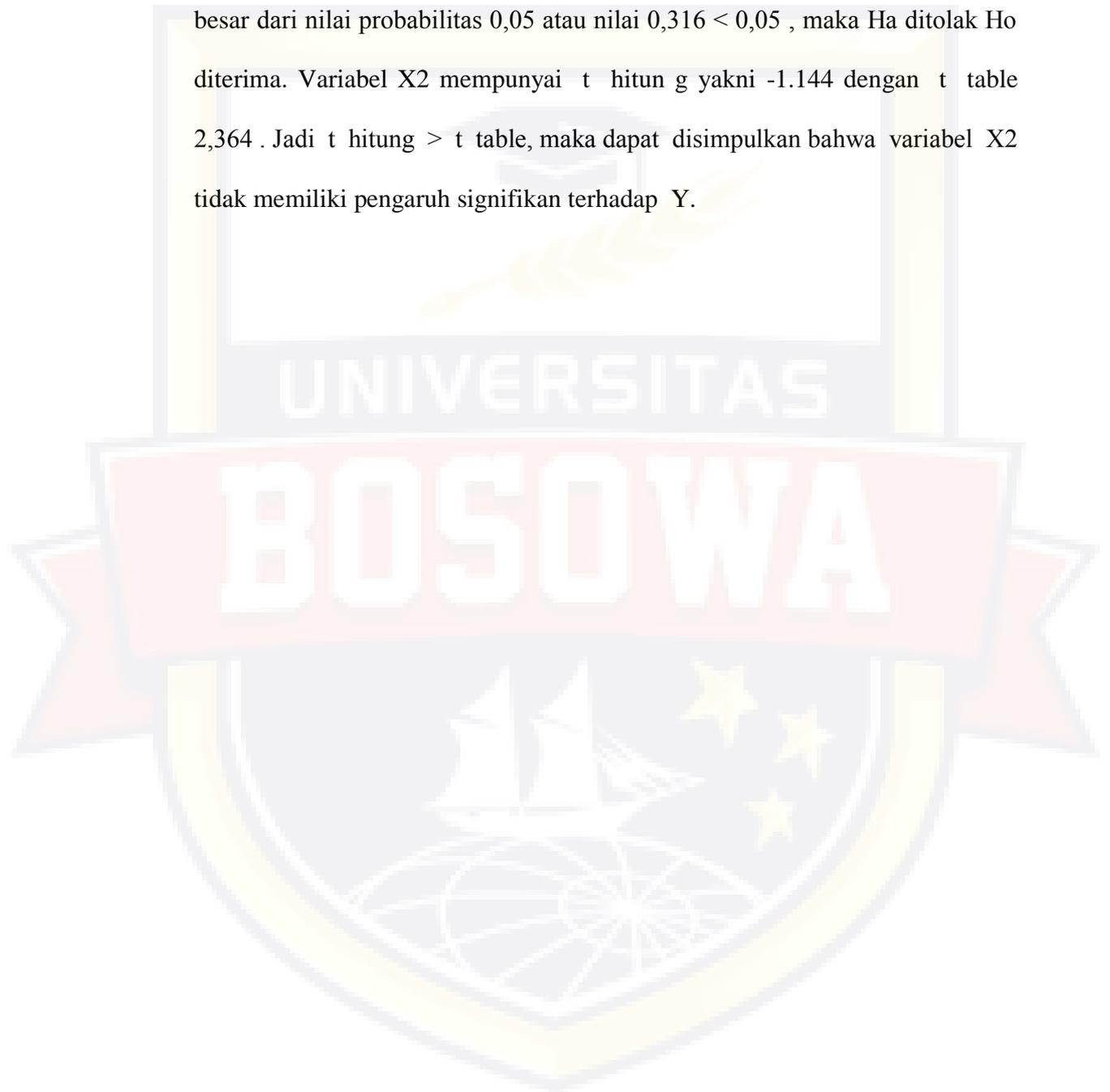
Untuk mencari t table liha pada lampiran atau t table dapat dicari di Ms Exel dengan cara pada cell kosong ketik = $\text{tinv}(0.05,7)$ lalu enter, t tabel yang di peroleh pada penelitian ini 2.364

2. Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB

Terlihat pada kolom *coefficients* nilai sig 0,501 nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,501 > 0.05$, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Variabel X1 mempunyai t hitung yakni 7380 dengan t table 2.364 jadi t hitung $>$ t table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.

3. Dana Perimbangan terhadap PDRB

Nilai signifikan untuk Dana Perimbangan 0,316 , nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,316 < 0,05$, maka H_0 ditolak H_0 diterima. Variabel X2 mempunyai t hitung yakni -1.144 dengan t table 2,364 . Jadi t hitung $>$ t table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

$$Y (\text{PDRB}) = 91.236 + 0,886X_1 + -0,2.095X_2$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal antara lain :

1. Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 91.912. Angka ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 919%
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0,886. Nilai koefisien regresi yang positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen maka nilai PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 88,6% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.
3. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi yaitu -0,2095. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1 persen akan mengalami kenaikan sebesar 20,95% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.

5.2 Saran.

1. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang harus optimal untuk menunjang Pembangunan suatu daerah, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam redistribusi atau pajak daerah.
2. Pemerintah Kota Makassar harus bisa menggunakan secara baik sumber Dana dari Pemerintah Pusat yaitu berupa Dana Perimbangan dan diharapkan lebih mandiri sehingga tidak terlalu tergantung pada dana pemerintah pusat. Pemerintah Kota Makassar juga harus bisa lebih efektif dan efisien dalam hal meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta dibuat secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad 2011 *Kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan otonomi Daerah.*
- Handi Aimon, Rova Luarto Putra 2009. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.* Jurnal Ekonomi
- Mardiasmo 2002 *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo 2004 *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta Undang-undang No.33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Edisi Pertama BPFE 1999*
- Muhamad Edwin Kadafi. 2009 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Modal.* Skripsi. Fakultas Ekonomi. Bandung
- Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Siahaan, Marihot P. 2005 *Pajak Daerah Dan Retribus Daerah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sunarto Drs dan Drs, Soedarsono DP, MM. (2007). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II. Edisi Keenam. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Penerbit : PT Raja Granfindo Persada DEPOK.*
- Prakoso, (2011) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) Dan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Terhadap Belanja Daerah.* Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun 2011.
- Sulfadli “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Kota Makassar*” Universitas Muslim Indonesia 2015
- Kuncoro “ *Realisasi Hubungan Yang Terjadi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

L

A

M

P

I

R

A

N



```

SAVE OUTFILE='D:\45\proposal_erna\master.sav'
/COMPRESSED.
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y

/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX SEMEAN.

```

Descriptives

Notes		
Output Created		08-Aug-2019 15:25:24
Comments		
Input	Data	D:\45\proposal_erna\master.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	7
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX SEMEAN.
Resources	Processor Time	00:00:00.000
	Elapsed Time	00:00:00.000

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PAD	7	345350562825.00	1337231047257.00	5331982492606.78	761711784658.1115	124397350352.95367	329124452789.28840
Dana Perimbangan	7	905316278541.00	1992747630282.00	10076652779794.00	1439521825684.8572	153805785715.27682	406931859205.51310
Pertumbuhan ekonomi	7	7.40	10.36	59.38	8.4829	.42548	1.12571
Valid N (listwise)	7						

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1ln X2ln
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)

/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3).
    
```

Regression

Notes

Output Created	08-Aug-2019 15:25:38	
Comments		
Input	Data	D:\45\proposal erna\master.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	7
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	<pre> REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1ln X2ln /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). </pre>	
Resources	Processor Time	00:00:00.889
	Elapsed Time	00:00:00.764
	Memory Required	1676 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Perimbangan, PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.864 ^a	.746	.619	.69466	.746	5.878	2	4	.064	1.459

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.673	2	2.837	5.878	.064 ^a
	Residual	1.930	4	.483		
	Total	7.603	6			

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	91.236	29.129		3.132	.035		
PAD	.886	1.200	.352	.738	.501	.280	3.576
Dana Perimbangan	-2.095	1.831	-.545	-1.144	.316	.280	3.576

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	Dana Perimbangan
1	1	3.000	1.000	.00	.00	.00
	2	.000	161.287	.37	.26	.00
	3	1.747E-5	414.338	.63	.74	1.00

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

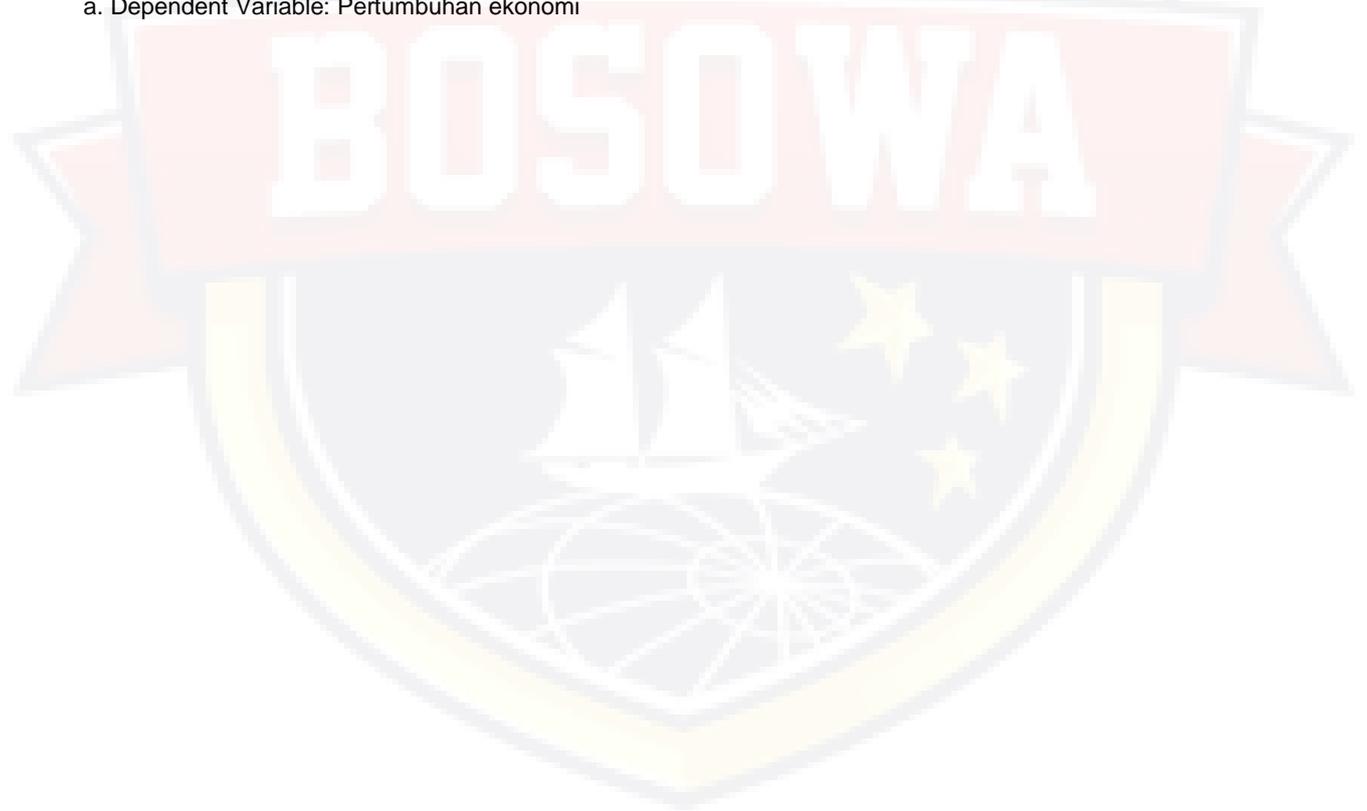
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.4399	10.0080	8.4829	.97238	7
Std. Predicted Value	-1.073	1.568	.000	1.000	7
Standard Error of Predicted Value	.320	.577	.444	.105	7
Adjusted Predicted Value	6.4282	9.5467	8.3189	1.17408	7
Residual	-.87503	.55007	.00000	.56719	7
Std. Residual	-1.260	.792	.000	.816	7
Stud. Residual	-1.420	1.260	.084	1.088	7
Deleted Residual	-1.11146	1.57185	.16391	1.06764	7
Stud. Deleted Residual	-1.745	1.405	.056	1.183	7
Mahal. Distance	.419	3.282	1.714	1.150	7
Cook's Distance	.040	1.177	.353	.391	7
Centered Leverage Value	.070	.547	.286	.192	7

Residuals Statistics^a

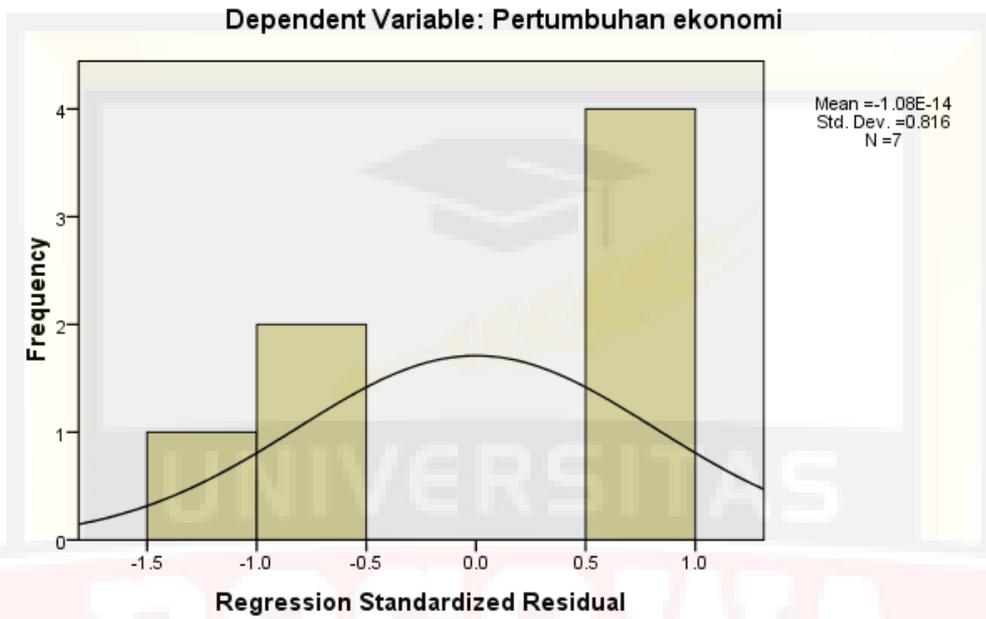
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.4399	10.0080	8.4829	.97238	7
Std. Predicted Value	-1.073	1.568	.000	1.000	7
Standard Error of Predicted Value	.320	.577	.444	.105	7
Adjusted Predicted Value	6.4282	9.5467	8.3189	1.17408	7
Residual	-.87503	.55007	.00000	.56719	7
Std. Residual	-1.260	.792	.000	.816	7
Stud. Residual	-1.420	1.260	.084	1.088	7
Deleted Residual	-1.11146	1.57185	.16391	1.06764	7
Stud. Deleted Residual	-1.745	1.405	.056	1.183	7
Mahal. Distance	.419	3.282	1.714	1.150	7
Cook's Distance	.040	1.177	.353	.391	7
Centered Leverage Value	.070	.547	.286	.192	7

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi



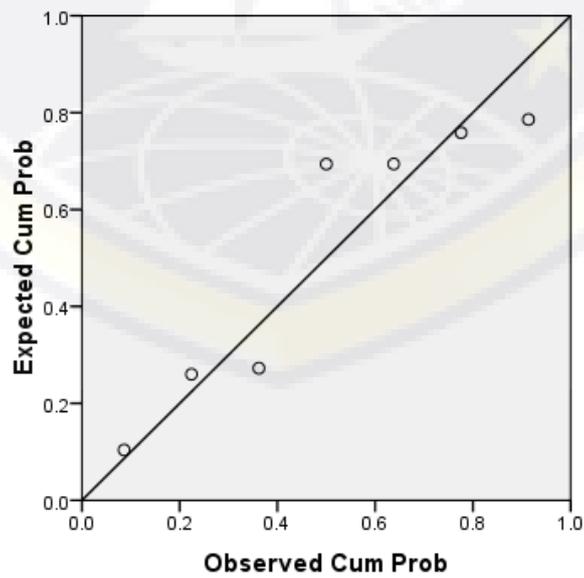
Charts

Histogram

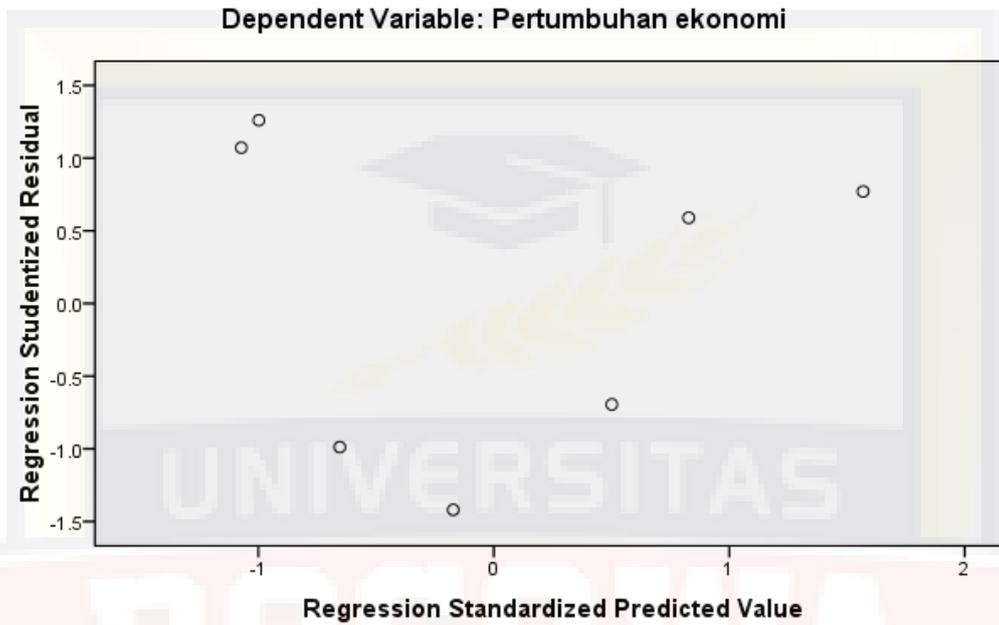


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi



Scatterplot



BOSOWA

